



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan RENJA tahun 2022 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, Perubahan RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700924 199003 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Landasan Hukum2

 1.3. Maksud dan Tujuan4

 1.4. Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
 Capaian RENSTRA-PD6

 2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kab. Kutai Kartanegara28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....32

4.1. Program dan Kegiatan32

BAB IV PENUTUP43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Perubahan RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
11. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2021 secara umum memiliki perubahan / penyesuaian Renja Diskominfo Tahun 2021, demikian juga untuk tahun berajalan yaitu tahun 2022, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal dikarenakan beberapa permasalahan dan hambatan pada tahun bersangkutan. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2022 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (8,57%)

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (50%)

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (66,67%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (99,33%)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (81,37%)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (75,71%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi Publik (100%)
- b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik (76,05%)

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (100%)
- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (100%)
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (100%)

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Layanan Hubungan Media (102,5%)

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

- 1. Masih kurang optimalnya Perencanaan Program dan Kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya masih belum optimal
- 2. Ada nya penambahan anggaran di perubahan yg nilainya cukup besar dan hrs dilakukan proses lelang, sehingga pd saat proses lelang tdk memungkinkan utk dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pd serapan anggaranMasih Kurangnya SDM baik di Bidang IT maupun di Bidang Layanan Publik
- 3. Adanya perubahan kebijakan maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan pandemi covid 19

4. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

5. Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Perlunya telaahan Program/Kegiatan yang menjadi Prioritas
- Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Peningkatan Kualitas Jaringan
- Pengadaan SDM baru khususnya SDM bidang IT
- Perlunya sosialisasi dan koordinasi OPD terkait integrasi dan pengembangan Aplikasi
- Penguatan Mobilitas Pembinaan KIM, Peningkatan kualitas SDM Kim melalui pelatihan dan Bimtek
- Perlunya menjangkau semua media sebagai mitra pemerintah melalui sumber daya yang tersedia
- Perlunya Sosialisasi dan Bimtek / Pelatihan terkait Data Statistik Sektoral

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Berjalan (2022)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
					Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,1 Indeks		3,1 Indeks					
					Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,96 Indeks		2,96 Indeks					
					Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	3,25 Indeks		3,25 Indeks					
					Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	3,05 Indeks		3,05 Indeks					
					Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,81 Indeks		2,81 Indeks					

2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai		21 Dokumen					
2	16	1	2.0 1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	5 Dokumen	23,81		26 Dokumen	61,90%
2	16	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	42,86		10 Dokumen	71,42%
2	16	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	2 Dokumen	14,29		16 Dokumen	57,14%
2	16	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33,33		4 Laporan	86,67%
2	16	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.968 Orang/Bulan	984 Orang/Bulan	984 Orang/Bulan	236 Orang/Bulan	23,78		1.220 Orang/Bulan	61,99
2	16	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33,33		4 Laporan	66,66
2	16	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25,00		5 Laporan	62,50
2	16	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25,00		5 Laporan	62,50
2	16	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		2 Dokumen	100,00

2	16	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	20 Orang	10 Orang	10 Orang	0 Orang	0,00		10 Orang	50,00
2	16	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	2 Layanan	40,00		7 Layanan	70,00
2	16	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0 Jenis	0,00		15 Jenis	50,00
2	16	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	57 Jenis	45 Jenis	6 Jenis	1 Jenis	16,67		46 Jenis	80,70
2	16	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100.000	10.000 Lembar	54.460 Lembar	10.000 Lembar	18,36		20.000 Lembar	20,00
2	16	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	400 Orang/Kali	50 Orang/Kali	200 Orang/Kali	50 Orang/Kali	2,38		100 Orang/Kali	25,00
2	16	1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	100 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	0 Berkas	0,00		50 Berkas	50,00
2	16	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen		50 Persen	50 Persen
2	16	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5 Persen	5,00		100 Persen	100,00
2	16	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2 Persen	2,00		100 Persen	100,00

2	16	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00		18 Bulan	75,00
2	16	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25,00		15 Bulan	62,50
2	16	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25,00		15 Bulan	62,50
2	16	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25,00		15 Bulan	62,50
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25,00		15 Bulan	62,50
2	16	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	200 Unit	100 Unit	100 Unit	50 Unit	50,00		150 Unit	75,00
2	16	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	44 Unit	22 Unit	22 Unit	6 Unit	27,27		28 Unit	63,63
2	16	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00		2 Unit	50,00
2	16	1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	6 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00		3 Unit	50,00

2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50,00		50 Persen	50,00
2	16	2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	1680 Informasi dan Komunikasi Publik	840 Informasi dan Komunikasi Publik	840 Informasi dan Komunikasi Publik	420 Informasi dan Komunikasi Publik	50,00		1.260 Informasi dan Komunikasi Publik	75,00
2	16	2	0,1	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	58 PPID	58 PPID	0 PPID	0,00		58 PPID	100,00
						Jumlah Pengaduan yang dikelola	24 Pengaduan	12 Pengaduan	12 Pengaduan	1 Pengaduan	8,33		13 Pengaduan	54,16
2	16	2	0,1	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	60 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	0 Laporan	0,00		30 Laporan	50,00
2	16	2	0,1	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	240 Konten Video	120 Konten Video	120 Konten Video	0 Konten Video	0,00		120 Konten Video	50,00
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola	126 konten Streaming	120 konten Streaming	6 konten Streaming	2 konten Streaming	33,33		122 konten Streaming	96,83
						Jumlah Konten Radio yang dikelola	128 konten Radio	120 konten Radio	8 konten Radio	4 konten Radio	50,00		124 konten Radio	96,88
2	16	2	0,1	1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	0,00		20 Orang	50,00
2	16	2	0,1	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kali	6 Kali	6 Kali	0 Kali	0,00		6 Kali	50,00
2	16	2	0,1	0 8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina	540 Orang	270 Orang	270 Orang	0 Orang	0,00		270 Orang	50,00
2	16	2	0,1	0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	6 media	3 media	3 media	0 media	0,00		3 media	50,00
2	16	2	0,1	0 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	40 Media	20 Media	20 Media	0 Media	0,00		20 Media	50,00
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	200 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	20 Kegiatan	20,00		120 Kegiatan	60,00

2	16	2	0,1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi	4 Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	0 Rancangan Regulasi	0,00		2 Rancangan Regulasi	50,00
2	16	2	0,1	1 1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	10 Kali	5 Kali	5 Kali	2 Kali	40,00		7 Kali	70,00
2	16	2	0,1	0 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	20,00		6 Laporan	60,00
2	16	2	0,1	0 9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi	10 Kali	5 Kali	5 Kali	0 Kali	0,00		5 Kali	50,00
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50,00		50 Persen	50,00
2	16	3	2.0 2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	58 OPD	58 OPD	27 OPD	46,50		58 OPD	100,00
2	16	3	0,1	0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server yang dikelola	30 Server	15 Server	15 Server	0 Server	0,00		15 Server	50,00
						Jumlah Lisensi	2 Lisensi	1 Lisensi	1 Lisensi	0 Lisensi	0,00		1 Lisensi	50,00
2	16	3	0,1	0 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00		3 Dokumen	50,00
2	16	3	0,1	0 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00		2 Laporan	50,00
2	16	3	0,1	1 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	0 Desa	13 Desa	4 Desa	30,77		4 Desa	30,77

2	16	3	0,1	0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	4 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00		2 Aplikasi	50,00
2	16	3	0,1	1 1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	12 Orang	6 Orang	6 Orang	0 Orang	0,00		6 Orang	50,00
2	16	3	0,1	1 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD	58 OPD	58 OPD	58 OPD	0 OPD	0,00		58 OPD	100,00
2	16	3	0,1		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	200 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	50 Sistem Informasi	50,00		150 Sistem Informasi	75,00
2	16	3	0,1	0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	40 OPD	20 OPD	20 OPD	0 OPD	0,00		20 OPD	50,00
						Jumlah Kapasitas Bandwith	800 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	90 Mbps	22,50		490 Mbps	61,25
						Jumlah BTS yang dipelihara	44 BTS	22 BTS	22 BTS	0 BTS	0,00		22 BTS	50,00
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50,00		50 Persen	50,00
2	20	2	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	58 OPD	58 OPD	27 OPD	46,50		27 OPD	46,50
2	20	2	2.0 1	0 1	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		1 Dokumen	50,00
2	20	2	2.0 1	0 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	260 Peserta	130 Peserta	130 Peserta	0 Peserta	0,00		130 Peserta	50,00

2	20	2	2.0 1	0 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		1 Dokumen	50,00
2	20	2	2.0 1	0 5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	18 unit	9 unit	9 unit	0 unit	0,00		9 unit	50,00
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	18,97 Persen	18,97 Persen	18,97 Persen	100,00		18,97 Persen	100,00
2	21	2	2.0 1		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	22 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100,00		22 OPD	100,00
2	21	2	0,1	0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		1 Dokumen	50,00
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	4 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	0,00		2 Orang	50,00
2	21	2	0,1	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	22 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100,00		22 OPD	100,00
2	21	2	0,1	0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	0 Layanan	0,00		1 Layanan	100,00
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	2 Kali	1 Kali	1 Kali	0 Kali	0,00		1 Kali	50,00

2	21	2	0,1	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	2 Rancangan Regulasi	1 Rancangan Regulasi	1 Rancangan Regulasi	0 Rancangan Regulasi	0,00		1 Rancangan Regulasi	50,00
2	21	2	0,1		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	2 Layanan JKS	1 Layanan JKS	1 Layanan JKS	0 Layanan JKS	0,00		1 Layanan JKS	50,00
2	21	2	0,1	0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	2 Layanan JKS	1 Layanan JKS	1 Layanan JKS	0 Layanan JKS	0,00		1 Layanan JKS	50,00

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2022)			Keterangan
								K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,10						
					Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,96						
					Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	3,25						
					Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	3,05						
					Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,81						
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai			17.648.114.434	6.876.697.984	38,97	
2	16	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen			163.331.000	19.861.150	12,16	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	42,86	56.906.000	6.916.000	12,15	

2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	4 Dokumen	28,57	106.425.000	12.945.150	12,16	
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan			10.979.240.610	4.646.160.060	42,32	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	467 Orang/Bulan	47,46	10.740.913.446	4.581.484.060	42,65	
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2 Laporan	66,67	238.327.164	64.676.000	27,14	
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Laporan			119.910.000	41.065.000	34,25	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	1 Laporan	25,00	119.910.000	41.065.000	34,25	
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			150.000.000	-	-	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang			150.000.000	-	-	Masih tahap koordinasi dengan pihak penyelenggara
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan			672.360.000	297.485.166	44,24	
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	100	102.360.000	95.912.000	93,70	
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	1 Jenis	16,67	100.000.000	37.524.100	37,52	

2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	54.460 Lembar	39.060 Lembar	71,72	150.000.000	23.111.000	15,41	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2.100 Orang/Kali	50 Orang/Kali	5,48	250.000.000	95.143.866	38,06	
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	45 Berkas	90,00	70.000.000	45.794.200	65,42	
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen			1.360.009.000	93.837.300	6,90	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	72 Persen	72,00	809.715.000	93.837.300	11,59	
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22 Persen	22,00	550.294.000	-	-	Masih proses pengerjaan
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan			3.001.463.824	1.013.519.127	33,77	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	6 Bulan	50,00	5.100.000	5.100.000	100,00	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	6 Bulan	50,00	742.000.000	236.500.633	31,87	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6 Bulan	50,00	2.254.363.824	771.918.494	34,24	

						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	6 Bulan	50,00				
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit			1.201.800.000	764.770.181	63,64	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	10 Unit	45,45	651.800.000	561.208.781	86,10	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	-	250.000.000	150.018.000	60,01	Masih dalam proses pelaksanaan
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	33,33	300.000.000	53.543.400	17,85	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen			5.605.357.333	224.422.500	4,00	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik			5.605.357.333	224.422.500	4,00	
2	16	2	02.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	0 PPID	-	300.000.000	23.972.000	7,99	
						Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	1 Pengaduan	8,33				
2	16	2	02.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	0 Laporan	-	700.000.000	4.750.000	0,68	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	120 Konten Video	0 Konten Video	-	300.000.000	-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan

						Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming	2 konten Streaming	33,33		-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah Konten Radio yang dikelola	8 konten Radio	4 konten Radio	50,00		-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	0 Orang	-	250.000.000	1.680.000		Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	0 Kali	-	300.000.000	39.580.000	13,19	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	0 Orang	-	500.000.000	88.356.500	17,67	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	0 media	-	350.000.000	15.410.000	4,40	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	20 Media	0 Media	-	2.380.357.333	-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	25 Kegiatan	25,00		-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	0 Rancangan Regulasi	-	75.000.000	3.625.000	4,83	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	2 Kali	40,00	50.000.000	6.109.000	12,22	
2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	2 Laporan	40,00	50.000.000	11.210.000	22,42	
2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	0 Kali	-	350.000.000	29.730.000	8,49	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100%			12.033.827.670	1.752.258.967	14,56	

2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD			7.733.827.670	938.849.124	12,14	
2	16	3	02.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server yang dikelola	15 Server	0 Server	-	1.405.967.000	765.892.800	54,47	Proses Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah Lisensi	1 Lisensi	0 Lisensi	-		-		Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	0 Dokumen	-	600.000.000	-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	2 Laporan	0 Laporan	-	150.000.000	47.047.756	31,37	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	0 Desa	-	4.902.860.670	3.078.600	0,06	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	0 Aplikasi	-	325.000.000	73.277.176	22,55	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	0 Orang	-	100.000.000	36.789.792	36,79	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD	58 OPD	0 OPD	-	250.000.000	12.763.000	5,11	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi			4.300.000.000	813.409.843	18,92	

2	16	3	02.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	6 OPD	30,00	4.300.000.000	813.409.843	18,92	Proses Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	90 Mbps	22,50		-		Proses Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	0 BTS	-		-		Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100%			1.450.000.000	454.986.200	31,38	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD			1.450.000.000	454.986.200	31,38	
2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	0 Dokumen	-	500.000.000	165.694.750	33,14	1. Proses Pelaksanaan sudah mencapai 58% 2. Kerjasama dengan BPS
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	130 Peserta	0 Peserta	-	250.000.000	87.872.200	35,15	Proses Pelaksanaan sudah mencapai 60%
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	0 Dokumen	-	200.000.000	18.380.000	9,19	Proses pelaksanaan sudah mencapai 55%
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	0 unit	-	500.000.000	183.039.250	36,61	Proses pelaksanaan sudah mencapai 60%
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen			775.000.000	9.430.000	1,22	

2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD			575.000.000	9.430.000	1,64	
2	21	2	02.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	0 Dokumen	-	150.000.000	-	-	Masih Tahap Koordinasi dan Konsolidasi
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	0 Orang	-		-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	21	2	02.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	11 OPD	100	200.000.000	-	-	Proses Pelaksanaan Kegiatan
2	21	2	02.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	0 Layanan	-	150.000.000	-	-	Pelaksanaan dalam proses pengadaan jasa konsultan Indeks KAMI
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	0 Kali	-		-	-	
2	21	2	02.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi	0 Rancangan Regulasi	-	75.000.000	9.430.000	12,57	Pelaksanaan dalam tahap penyusunan draf Perbup Keamanan Informasi
2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS			200.000.000	-	-	
2	21	2	02.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	0 Layanan JKS	-	200.000.000	-	-	Proses Pengadaan sudah selesai, masih dalam proses

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(10)	(12)	(12)	(14)
1	Indeks SPBE		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	3,10	3,15	3,20	3,20	3,20	2,48	3,10	3,15	
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,96	3,01	3,06	3,06	3,06	2,40	2,96	3,01	
3	Indeks Domain Layanan SPBE			3,25	3,30	3,35	3,35	3,35	3,19	3,25	3,30	
4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,05	3,10	3,15	3,15	3,15	1,18	3,05	3,10	
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			2,81	2,92	3,03	3,03	3,03	1,80	2,81	2,92	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	84,00	86,00	86,00	86,00	84,05	82,00	84,00	
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	18,97	37,93	56,89	56,89	56,89	18,97	18,97	37,93	
11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	21	21	21	21	21	21	21	21	
12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		6. Tingkat keamanan informasi pemerintah	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	

18	Jumlah Barang Milik Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840	840	840	840	840	840	840	840	
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government		58	58	58	58	58	58	58	58	
21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola		100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58	58	58	58	58	58	58	58	
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		11	11	11	11	11	4	11	11	
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1	1	1	1	1	-	1	1	

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara ” **Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia** ”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan. Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebesar **Rp. 40.483.299.437,-** (Empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- c) Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan APBD Tahun 2022 ada beberapa sub kegiatan dikarenakan adanya pergeseran Pagu Anggaran, Tambahan Pagu Anggaran serta penyesuaian Belanja serta Indikator.
- d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD) 2022				Sesudah Perubahan (APBD-P) 2022				Bertambah / Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai		17.648.114.434	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai		18.248.114.434	600.000.000	82,00 Nilai	15.984.481.540
2	1	1	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen		163.331.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen		163.331.000	-	18 Dokumen	200.000.000
2	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	56.906.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	56.906.000	-	7 Dokumen	100.000.000
2	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar	14 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	106.425.000	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar	14 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	106.425.000	-	14 Laporan	100.000.000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD							
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan		10.979.240.610	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan		11.013.920.610	34.680.000	2 Laporan	11.006.217.716
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	Kab. Kutai Kartanegara	10.740.913.446	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	Kab. Kutai Kartanegara	10.740.913.446	-	984 Orang/Bulan	10.694.925.552
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	238.327.164	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	273.007.164	34.680.000	3 Laporan	311.292.164
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Laporan		119.910.000	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Laporan		127.110.000	7.200.000	4 Dokumen	125.000.000
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	119.910.000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	127.110.000	7.200.000	4 Laporan	125.000.000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		150.000.000	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		150.000.000	-	1 Dokumen	150.000.000
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000	-	10 Orang	150.000.000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan		672.360.000	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan		672.360.000	-	5 Layanan	470.000.000
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	15 Jenis	Kab. Kutai	102.360.000,00	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	15 Jenis	Kab. Kutai	102.360.000,00	-	1 Paket	100.000.000,00

						Kantor yang disediakan		Kartane gara		kantor yang tersedia		Kartane gara				
2	1 6	1	2. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	Kab. Kutai Kartane gara	100.000.000	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	Kab. Kutai Kartane gara	100.000.000	-	1 Paket	50.000.000
2	1 6	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54.460 Lembar	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54.460 Lembar	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	-	1 Paket	50.000.000
2	1 6	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2.100 Orang/Kal i	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	200 Orang/Kal i	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	-	50 Lapora n	200.000.000
2	1 6	1	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	Kab. Kutai Kartane gara	70.000.000	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	Kab. Kutai Kartane gara	70.000.000	-	1 Dokum en	70.000.000
2	1 6	1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		1.360.009.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		1.782.303.000	422.294.000	100 Persen	450.000.000
2	1 6	1	2. 07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kutai Kartane gara	809.715.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kutai Kartane gara	1.009.715.000	200.000.000	1 Unit	250.000.000
2	1 6	1	2. 07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kutai Kartane gara	550.294.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kutai Kartane gara	772.588.000	222.294.000	25 Unit	200.000.000
2	1 6	1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		3.001.463.824	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		2.783.705.760	(217.758.064)	12 Bulan	3.001.463.824
2	1 6	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	Kab. Kutai Kartane gara	5.100.000	Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	Kab. Kutai Kartane gara	5.100.000	-	1 Lapora n	5.100.000
2	1 6	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kab. Kutai Kartane gara	742.000.000	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kab. Kutai Kartane gara	742.000.000	-	1 Lapora n	742.000.000

2	1 6	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kab. Kutai Kartanegara	2.254.363.824	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kab. Kutai Kartanegara	2.036.605.760	(217.758.064)	3 Laporan	2.254.363.824
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan			2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan			-	12 Bulan	
2	1 6	1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit		1.201.800.000	Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit		1.555.384.064	353.584.064	100 Unit	581.800.000
2	1 6	1	2. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	651.800.000	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	651.800.000	-	22 Unit	131.800.000
2	1 6	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	603.584.064	353.584.064	1 Unit	150.000.000
2	1 6	1	2. 09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	-	15 Unit	300.000.000
2	1 6	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Porsen		5.605.357.333	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Porsen		5.605.357.333	-	100 Porsen	2.605.357.333
2	1 6	2	2. 01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik		5.605.357.333	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik		5.605.357.333	-	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333

2	1	2	2	0	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000,00	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000,00	-	5 Dokumen	500.000.000,00
						Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara		Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara		-	2 Dokumen	
2	1	2	2	0	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	30 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	700.000.000	-	4 Dokumen	200.000.000
2	1	2	2	0	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	120 Konten Video	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah Konten Video yang dikelola	8 Konten Video	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	-	6 Dokumen	300.000.000
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming			Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming			-	200 Dokumen	
						Jumlah Konten Radio yang dikelola	8 konten Radio			Jumlah Konten Radio yang dikelola	120 konten Radio			-	3 Dokumen	
2	1	2	2	1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	-	-	-
2	1	2	2	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	-	6 Dokumen	300.000.000
2	1	2	2	0	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	Jumlah Orang Yang di Bina	270 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	-	200 Dokumen	300.000.000
2	1	2	2	0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000	Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000	-	3 Dokumen	200.000.000
2	1	2	2	0	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	20 Media	Kab. Kutai Kartanegara	2.380.357.333	Jumlah Media Massa	20 Media	Kab. Kutai Kartanegara	2.380.357.333	-	5 Layanan	530.357.333
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara		Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara		-	-	

2	1	2	2.	0	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	-	1 Dokumen	75.000.000
2	1	2	2.	1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000
2	1	2	2.	0	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	-	1 Dokumen	50.000.000
2	1	2	2.	0	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000	-	1 Dokumen	50.000.000
2	1	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	1		12.033.827.670	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	1		14.204.827.670	2.171.000.000	1	12.033.827.670
2	1	3	2.	0	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD		7.733.827.670	Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD		9.604.827.670	1.871.000.000	58 OPD	4.130.967.000
2	1	3	2.	0	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server yang dikelola	15 Server	Kab. Kutai Kartanegara	1405967000	Jumlah Server yang dikelola	15 Server	Kab. Kutai Kartanegara	3276967000	1.871.000.000	1 Unit	1.640.688.158
						Jumlah Lisensi	1 Lisensi	Kab. Kutai Kartanegara		Jumlah Lisensi	1 Lisensi	Kab. Kutai Kartanegara		-	0	
2	1	3	2.	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	600000000	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	6 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	500000000	(100.000.000)	0	-
2	1	3	2.	0	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	150000000	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	250000000	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000
2	1	3	2.	0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	Kab. Kutai Kartanegara	4.902.860.670	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	Kab. Kutai Kartanegara	4.902.860.670	-	3 Dokumen	1.765.278.842
2	1	3	2.	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	325.000.000	Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	325.000.000	-	2 Unit	175.000.000

2	1	3	2.	1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	100.000.000	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	100.000.000	-	6 Dokum en	100.000.000
2	1	3	2.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD	58 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	Jumlah OPD	58 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	-	1 Dokum en	250.000.000
2	1	3	2.	01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi		4.300.000.000	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi		4.600.000.000	300.000.000	100 Sistem Informasi	7.902.860.670
2	1	3	2.	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	4.300.000.000	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	4.600.000.000	300.000.000	23 Unit	7.902.860.670
						Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps			Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps			-	-	
						Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS			Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS			-	-	
2	2	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen		1.450.000.000	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen		1.650.000.000	200.000.000		1.450.000.000
2	2	0	2.	01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD		1.450.000.000	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD		1.650.000.000	200.000.000	1	1.450.000.000
2	2	0	2.	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	500.000.000	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	850.000.000	350.000.000	1 Dokum en	500.000.000
2	2	0	2.	01	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	130 Peserta	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	135 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	283.079.000	33.079.000	136 Orang	250.000.000
2	2	0	2.	01	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	200.000.000	Jumlah Dokumen Metadata	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	250.000.000	50.000.000	1 Dokum en	200.000.000
2	2	0	2.	01	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	Kab. Kutai	500.000.000	Jumlah Perangkat	9 unit	Kab. Kutai	266.921.000	(233.079.000)	5 unit	500.000.000

								Kartane gara		Pendukung Statistik Sektoral		Kartane gara					
2	21	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen		775.000.000	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen		775.000.000	-		700.000.000
2	21	2	2.01			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD		575.000.000	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD		575.000.000	-	18,97 Persen	500.000.000
2	21	2	2.01	02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	-	11 OPD	150.000.000
							Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	Kab. Kutai Kartane gara		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	Kab. Kutai Kartane gara		-	1 Laporan	
2	21	2	2.01	03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	200.000.000	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	Kab. Kutai Kartane gara	200.000.000	-	1 Laporan	200.000.000
2	21	2	2.01	04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	Kab. Kutai Kartane gara	150.000.000	-	1 Perangkat Daerah	150.000.000
							Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	Kab. Kutai Kartane gara		Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	Kab. Kutai Kartane gara		-		
2	21	2	2.01	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi		75.000.000	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi		75.000.000	-	-	-

2	2	2	2.		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS		200.000.000	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS		200.000.000	-	1 Layana n JKS	200.000.000
2	2	2	2.	0	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	Kab. Kutai Kartane gara	200.000.000	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	Kab. Kutai Kartane gara	200.000.000	-	1 Perang kat Daerah	200.000.000
Jumlah									37.512.299.437				40.483.299.437	2.971.000.000		32.773.666.543

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. RencanaTindakLanjut.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 berlaku sejak tanggal di ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tenggarong, Agustus 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara

Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001

Nama	Jabatan	Paraf
SOLIHIN, S.Sos., MT	Sekretaris	
Maulida Savitri, SP	Plt. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JalanPahlawan No. 1 Bukit Biru☎ (0541) 661350,Fax.(0541) 661834 KodePos 75511

Website :diskominfo.kutaikartanegarakab.go.od Email : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-197/SK-TIM/DISKOMINFO/07/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
11. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keutusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dimaksud dalam diktum Kcsatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dan menyusun serta membantu segala yang dibutuhkan baik data maupun informasi serta kebutuhan lainnya dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 8 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-197/SK-TIM/DISKOMINFO/07/2022
TANGGAL : 8 Juli 2022

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	DAFIP HARYANTO,S.Sos,M.Si NIP. 19700924 199003 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SOLIHIN, S.Sos. MT Nip. 19721029 199102 1 001	Sekretaris	Ketua
3.	MAULIDA SAVITRI, SP Nip. 19790203 200801 2 025	Plt. Kasubbag Penyusunan Program Dan Keuangan	Sekretaris
4.	ERY HARIYONO, SE, M.Si Nip. 19791029 201001 1 004	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	TANTRI SAPTA DEWI, ST Nip. 19740922 200801 2 011	Plt. Kepala Bidang E- Government	Anggota
6.	AHMAD RIAN TO,SIP Nip. 19660116 199403 1 006	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
7.	H. SURYA ADMAJA, SP Nip. 19700402 199912 1 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Layanan Publik	Anggota
8.	H. ASDI, SE. MAP Nip. 19690313 200112 1 001	Kepala Bidang Statistik	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001